

# **PROSES KOMUNIKASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Deskriptif Proses Komunikasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pejabat DPRD  
Tingkat Kabupaten / Kota dan Propinsi)

## **COMMUNICATION PROCESS THE PERPETRATOR OF CORRUPTION**

(Descriptive Study of Communication Process in Regional Parliament or Legislature Position  
in Over District/Cities and Provinces)

**Faidah Nailatir Rahmah dan Ira Dwi Mayangsari**

Ilmu Komunikasi

Universitas Telkom

faidahnayla@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi antara pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat kabupaten/kota dan propinsi selaku legislatif, dengan individu-individu dalam lingkungan kerjanya baik rekan sesama legislatif, eksekutif, maupun pihak swasta yang terlibat dalam proyek-proyek yang diadakan oleh legislatif.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif, yang melibatkan para pelaku korupsi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan propinsi. Pengambilan informan diambil sebanyak tiga orang yakni mantan Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, penelusuran data *online*, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara pelaku korupsi dengan lingkungan kerjanya adalah interaksi tatap muka dalam konteks komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok. Pesan yang digunakan dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan nonverbal. Sedangkan karakteristik komunikator pada proses komunikasi adalah para individu yang merasa gaji yang diperoleh masih rendah, dan memiliki kebutuhan yang tinggi atas *physical needs*. Media diteliti untuk mengidentifikasi jenis proses komunikasi yang terjadi, proses komunikasi primer atau sekunder. Korupsi dalam komunikasi dapat terjadi karena adanya kebutuhan atau tujuan tertentu dari sebuah komunikasi yang ditunjang oleh kekuasaan atau wewenang dengan mengurangi hak publik, yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah kebenaran normatif dan tanggung jawab moral.

**Kata Kunci:** Proses Komunikasi, Tindak Pidana Korupsi

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the communication process that occurs between the perpetrator of corruption which is the official of regional parliament or legislature position in over district/cities and provinces (DPRD) and the individuals in their works environment either legislative, executive, or private parties fellows that involved in some projects organized by the legislature.

In this study, the author used a qualitative approaching with a descriptive study method which involves the perpetrators of corruption at district/cities and province legislative level. The informant has taken from three different perpetrator of corruption at their district legislative which is a former Chairman of the Budget Committee Yogyakarta City, a Chairman of the parliament Bojonegoro City, and a Vice Chairman of the Parliament of Riau province. Data collection technique used were an interview, online data searching, and literature study.

The results showed that the interaction between the perpetrators of corruption and the work environment is face-to-face interaction over an interpersonal communication context, and group communication. Message which used in those process is verbal and non-verbal messages. While the characteristic of the communicator in the communication process is the individuals who unsatisfied by their earned salary and has a high demand of physical needs. Media studied to identify the type of communication process that occur either primary or secondary communication process. Corruption in communication can occur because of their needs or some other purpose which supported by the power or authority by reducing public rights which is done by denying the rules of normative truth and moral responsibility.

**Keywords:** *Communication Process, Corruption*

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Korupsi merupakan salah satu pelanggaran hukum pidana, yakni pada kondisi seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Di Indonesia korupsi menjadi semacam hal yang sudah wajar dan bahkan telah membudaya. Korupsi ibaratkan kejahatan berantai yang tidak hanya melibatkan satu orang melainkan melibatkan banyak orang dan saling terkait. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. *Transparency International*, sebuah lembaga survey yang berbasis di Berlin, Jerman mengeluarkan data yang menggambarkan betapa tingginya angka korupsi di Indonesia, dibandingkan negara-negara lain yakni menduduki peringkat pertama se-Asia Pasifik dan peringkat 118 dari 176 negara di dunia pada 2012.

Banyaknya kasus korupsi dari beberapa instansi yang ditangani KPK menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar, yakni bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Menurut Soeganda Priyatna (2011:451) kondisi instansi saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (a) masih adanya karakter patrimonial (di mana para pejabat

beranggapan bahwa administrasi politik merupakan urusan pribadi, dan merupakan perluasan dari urusan “rumah tangganya”), (b) masih kentalnya hubungan individual, yang mencerminkan adanya kolusi, nepotisme, dan korupsi, (c) masih kuatnya tradisi rutinitas, dalam arti bahwa bekerja adalah kegiatan rutin tanpa adanya dinamika dan kreativitas, serta cakupan tugas tidak spesifik, tidak jelas prosedur dan mekanismenya, (d) sentralisasi kekuasaan dengan pola yang sangat berbeda dengan birokrasi pada negara-negara maju, yakni pejabat cenderung sewenang-wenang, penggunaan kekerasan/premanisme untuk menangani kasus-kasus yang membahayakan posisinya, penyelesaian masalah dan keputusan didasarkan atas pemikiran kelompok yang terbatas (*group think*).

Komunikasi yang terjalin antara pelaku korupsi dengan lingkungan kerja tersebut tidak lepas dari sebuah proses komunikasi karena proses komunikasi merupakan bagian yang menentukan, apakah komunikasi berjalan baik atau tidak. Sehingga proses komunikasi dianggap penting karena dapat melihat apakah penerima pesan memaknai pesan sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim pesan atau tidak. Selain itu dapat terlihat juga apakah pengirim pesan mendapatkan *feedback* dari komunikan dengan sesuai atau tidak. Maka mengacu pada data KPK yang menunjukkan tingginya angka korupsi pada pejabat DPR/DPRD, peneliti tertarik untuk meneliti proses komunikasi yang terjadi pada pejabat DPR/DPRD. Banyaknya tingkat korupsi pada pejabat tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan “bagaimana proses komunikasi pelaku tindak pidana korupsi dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai fenomena tindak pidana korupsi, maka fokus penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan:

### **1.2.1 Pertanyaan Makro**

Dalam penelitian ini, pertanyaan makro yang disimpulkan adalah: Bagaimana proses komunikasi pelaku tindak pidana korupsi dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi?

### **1.2.2 Pertanyaan Mikro:**

1. Bagaimana interaksi antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
2. Bagaimana pesan verbal dan nonverbal antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
3. Bagaimana karakteristik komunikator dalam komunikasi antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
4. Bagaimana media yang digunakan antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

#### 2.1.1 Komunikasi

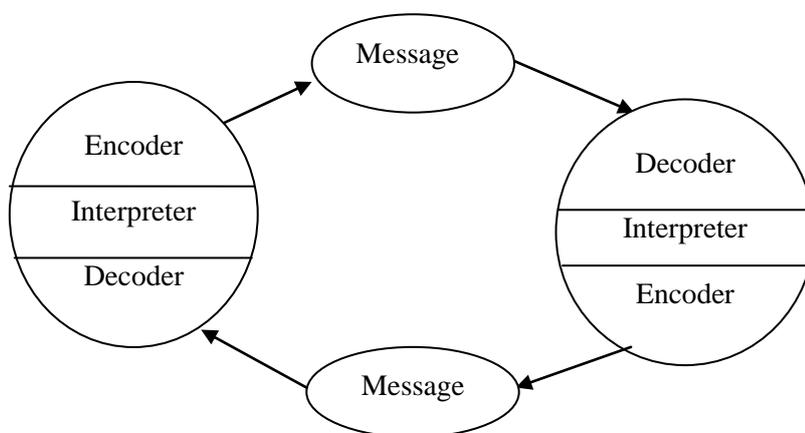
##### 2.1.1.1 Pengertian Komunikasi

Dalam Effendy (2009 : 10) Istilah komunikasi berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti *sama*. *Sama* disini maksudnya adalah *sama makna*. Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hovland di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (publik *opinion*) dan sikap publik (publik *attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus mengenai pengertian komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*).

##### 2.1.2 Proses Komunikasi

Rusady menyatakan bahwa pengertian proses komunikasi yakni diartikan sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan (*message*) dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan (*feed back*) untuk mencapai saling pengertian (*mutual understanding*) antar kedua belah pihak. (Ruslan 2003 : 69).

**Gambar 2.1 Model Schramm**



Sumber: Wilbur Schramm. "How Communication Works." Dalam Jean M. Civikly, ed. *Messages: A reader in Human Communication*. Dalam Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 152

Menurut Schramm, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, jelas bahwa setiap orang dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai *encoder* dan *decoder*. Kita secara konstan menyandi-balik tanda-tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda-tanda tersebut, dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya. (Mulyana, 2008: 153).

### **2.1.3 Pola Komunikasi Korupsi**

Menurut Rinawati (2012: 13) Pola komunikasi yang dilakukan oleh para koruptor akan berkaitan dengan model dan tatanan komunikasi yang digunakan. Model yang bisa digunakan dalam melakukan korupsi adalah model yang sederhana yaitu adanya pengirim dan penerima. Namun demikian model komunikasi yang digunakan dalam korupsi bisa juga melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, atau bahkan adanya penggunaan media seperti yang sering digunakan yaitu media telepon. Penggunaan media telepon atau *Blackberry* (BB) menjadi media populer yang digunakan dalam kasus korupsi. Hal ini dikarenakan media ini merupakan media komunikasi yang personal, sehingga tidak bisa diketahui banyak orang.

### **2.1.7 Korupsi**

Pengertian korupsi dalam hal ini dapat dipandang dari dua sisi yakni pengertian dari segi bahasa dan pengertian berdasarkan undang-undang. Pengertian korupsi dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Bahasa Yunani mengartikan *corruption* sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materil, mental, dan umum. Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Berikut ini 7 (tujuh) jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas (dalam Patiro, 2012: 130-131) dalam Rinawati (2012: 9), yaitu:

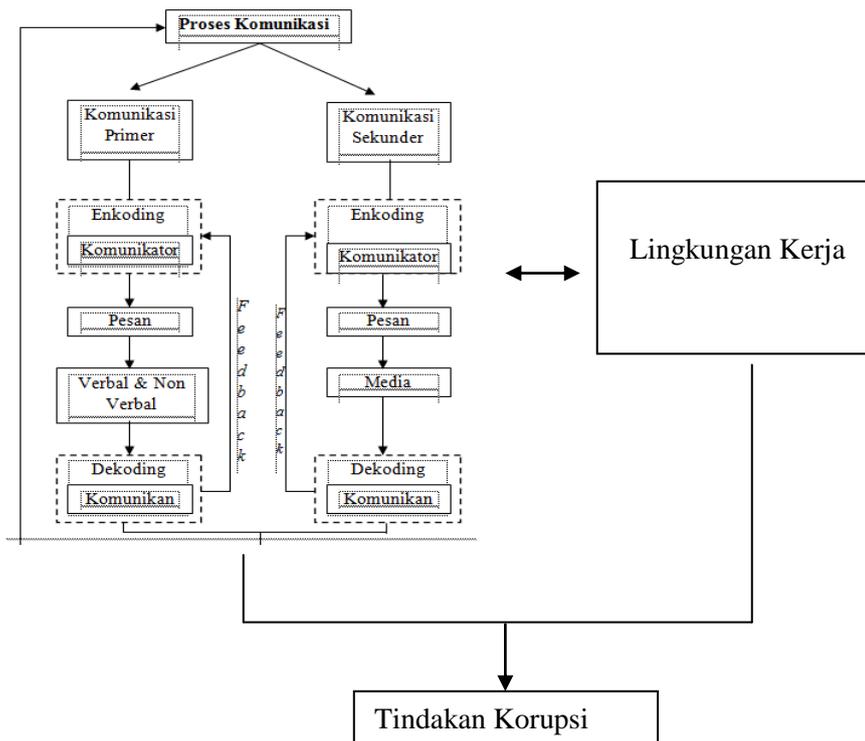
1. Korupsi transaktif, yaitu jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima
2. Korupsi perkerabatan, yaitu korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
3. Korupsi investif, yaitu korupsi dengan memberikan jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan

4. Korupsi *defensive*, yaitu pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban korupsi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai dasar pola berpikir dalam penelitian yang dilakukan kepada para pejabat DPRD Kota/Kabupaten dan Propinsi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin Bandung. Berikut ini adalah skema kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti.

**Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Olahan Penulis, 2014*

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005) dalam Herdiansyah (2012:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif dimana Penelitian studi deskriptif adalah kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

### 3.2 Unit Analisis

Input	Analisis	Sub Analisis (Komunikasi Primer)	Sub Analisis (Komunikasi Sekunder)
Encoding	Komunikator	1. Kredibilitas 2. Kepercayaan 3. Daya Tarik	1. Kredibilitas 2. Kepercayaan 3. Daya Tarik
	Jumlah komunikator	1. Individu 2. Kelompok	1. Individu 2. Kelompok
Pesan	Bentuk Pesan	1. Verbal 2. Non Verbal	1. Media Komunikasi Lisan 2. Media Komunikasi Tertulis
Decoding	Penerimaan makna	1. Negatif 2. Positif	1. Negatif 2. positif
	Komunikasi	1. Kredibilitas 2. Kepercayaan 3. Daya Tarik	1. Kredibilitas 2. Kepercayaan 3. Daya Tarik
Feedback	Respon yang akan dihasilkan komunikator	1. Langsung 2. Tidak langsung	1. Langsung 2. Tidak Langsung

Sumber: Olahan Penulis, 2014

### 3.3 Pengumpulan Data

Data pada penelitian kualitatif umumnya berbentuk uraian, narasi, atau pernyataan yang diperoleh dari subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, penelusuran data *online*, serta studi kepustakaan

### 3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman, diawali dengan tahap pengumpulan data, yakni proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian (Satori, 2011: 39), lalu dilanjutkan dengan melakukan reduksi data yakni memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian melakukan penyajian data dalam bentuk diagram baik tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya sesuai data yang didapat. Tahapan terakhir dalam teknik analisis ini adalah *conclusion drawing* yakni menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Hasil Penelitian**

###### **4.1.1 Interaksi**

Interaksi yang terjadi pada beberapa kasus yang diteliti oleh penulis ditemukan bahwa interaksi yang terjadi saat korupsi didominasi oleh interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka ini terdiri dari konteks tatap muka dalam komunikasi antarpribadi, maupun komunikasi kelompok. Interaksi dilakukan dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka dalam masing-masing kasus. Berikut ini tabel hasil penelitian mengenai interaksi yang terjadi pada beberapa kasus korupsi yang diteliti.

###### **4.1.2 Pesan Verbal dan Nonverbal**

Pesan yang ditransmisikan oleh komunikator ke komunikan dalam proses komunikasi pada beberapa kasus yang diteliti oleh penulis berupa pesan verbal dan non verbal. Pesan non verbal yang digunakan dalam bentuk sikap diam dan tidak melawan yang dilakukan oleh pihak yang kekuasaannya lebih rendah. Hal ini dilakukan agar pihak tersebut tidak terancam jabatannya serta mendapat keuntungan dari aktivitas korupsi yang dilakukannya dengan pejabat DPRD. Pesan verbal nampak pada komunikasi yang dilakukan saat perundingan hingga pengambilan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat DPRD.

###### **4.1.3 Karakteristik Komunikator**

Setiap komunikator yang terlibat dalam proses komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini menentukan arah komunikasi dan jalannya komunikasi selanjutnya. Sebagai seorang pejabat, tentunya para anggota DPRD ingin mencari perhatian dari konstituennya, yakni orang-orang atau masyarakat yang memilihnya pada saat pemilihan legislatif agar tidak nampak mengecewakan. Selain itu kurang kritisnya pihak legislatif dalam perancangan anggaran daerah juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi.

###### **4.1.4 Media Komunikasi**

Sub bab ini dibuat untuk mendeteksi proses komunikasi apa yang terjadi pada masing-masing kasus korupsi, apakah proses komunikasi primer atau sekunder. Pada proses komunikasi primer, media tidak terlibat karena proses komunikasi primer lambang adalah media itu sendiri. Lambang yang dimaksud yakni bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan pada proses komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan

komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak (Effendy, 2009: 11). Maka, pada penelitian ini peneliti membagi media dalam komunikasi sekunder menjadi dua macam, yakni media lisan dan media tertulis.

Dalam sebuah proses komunikasi tidak akan terlepas dari sebuah media sebagai alat perantara sebuah pesan. Penggunaan media komunikasi juga dapat memengaruhi *feedback* dalam sebuah proses komunikasi, terutama dalam komunikasi politik. Media komunikasi lisan dan tulisan sama-sama digunakan dalam komunikasi di lingkungan legislatif dan eksekutif, namun masing-masing memiliki perannya. Menurut Wibowo (2012 : 48) fitur utama kelisanan adalah menciptakan rasa kebersamaan. Dengan kurang atau ketiadaan abstraksi, substansi perbincangan menjadi tidak penting dibanding fungsi kebersamaan. Komunikasi politik di Indonesia yang didominasi kelisanan dengan demikian lebih menekankan pada kebersamaan dan rasa kesatuan dari pada konflik dalam substansi permasalahan.

Secara umum, proses komunikasi yang menyebabkan tindakan korupsi terjadi pada lini legislatif yakni proses komunikasi primer dan sekunder. Media pada proses komunikasi sekunder yang sering digunakan adalah media tertulis, berupa ketetapan-ketetapan yang berbentuk APBD, RPP, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur dan terkait dengan kinerja legislatif.

## **4.2 Pembahasan**

Sebuah pesan ditransmisikan oleh komunikator dengan indera bibir atau lengan untuk diterima komunikan dengan indera telinga atau mata. Proses perjalanan pesan dari seseorang kepada orang lain, atau dalam bahasa “komunikasi” dari komunikator kepada komunikan, kini bukan lagi proses psikologis melainkan proses sosiologis (Effendy, 2003: 360). Dari hasil wawancara, interaksi terjadi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan (komunikasi interpersonal), maupun beberapa komunikan (komunikasi kelompok). Interaksi tatap muka dalam aktifitas pelaksanaan tugas pejabat DPRD terjadi antara pejabat DPRD dengan pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud yakni lembaga eksekutif yang disebut sekretaris dewan (sekwan) dan pihak eksternal yang dimaksud adalah orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek yang didanai pemerintah melalui persetujuan DPRD. Pesan yang disampaikan pun dapat secara langsung mendapatkan *feedback* baik berupa sebuah keputusan langsung maupun keputusan yang dibicarakan secara bersama-sama antara kedua belah pihak. Dalam interaksi tatap muka, kedua belah pihak dapat secara langsung melihat, mendengar, dan merasakan umpan balik saat interaksi terjadi. Interaksi tatap muka membantu proses komunikasi berjalan dengan lancar karena komunikator dan komunikan dapat membaca situasi yang ada pada saat proses komunikasi berlangsung. Seperti situasi mendesak salah satunya. Interaksi tatap muka dianggap efektif karena tidak ada bias makna dari apa yang ingin disampaikan.

Pada sebuah proses komunikasi, sebuah komunikasi diawali oleh *encoding* yang dilakukan oleh komunikator. *Encoding* ini merupakan sebuah proses, di mana menurut

Effendy (2009 :11) berarti ia memformulasikan pikiran dan/ atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Formulasi dari pikiran atau perasaan komunikator berupa sebuah pesan yang ditransmisikan. Pesan ini dapat berupa pesan verbal atau nonverbal, maupun gabungan keduanya. Setelah disampaikan kepada komunikan, menurut Effendy (2009:11) kemudian menjadi giliran komunikan untuk *mengawa-sandi (decode)* pesan dari komunikator itu. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertiannya. Dalam proses itu komunikator berfungsi sebagai penyandi (*encoder*) dan komunikan sebagai *pengawa-sandi (decoder)*. Tindakan koruptif dalam komunikasi paling sering berpeluang terjadi pada komunikasi persuasi dan komunikasi pencitraan, dan dilakukan baik oleh suatu individu maupun institusi atau bersama-sama dalam suatu komunitas industrial, seperti antara industry media dan industry periklanan atau korporasi, industri media dan suatu entitas politik. Tindakan koruptif lain adalah pemanfaatan fasilitas publik sebagai alat maupun pesan komunikasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.

Pada proses komunikasi antara legislatif dan eksekutif, lebih banyak menggunakan komunikasi lisan, dengan memanggil pihak eksekutif, melalui ajudan. Media komunikasi tertulis digunakan saat berada pada posisi saling berjauhan, yakni dengan memanfaatkan teknologi media komunikasi telepon genggam, melalui *short message service* atau SMS, maupun teknologi *chatting media "blackberry mesanger"* yang sering digunakan dalam keadaan tidak dapat bertatap muka saat ingin melakukan komunikasi.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa proses komunikasi yang terjadi adalah proses komunikasi primer dan sekunder. Proses komunikasi yang terjadi dalam lingkup eksekutif dan legislatif merupakan proses komunikasi primer dan sekunder. Pada proses komunikasi primer, komunikator dan komunikan saling mengirim pesan dan memberikan *feedback*. Sudut pandang baru ditemukan dalam penelitian ini, yakni tindakan korupsi tidak semata-mata dilakukan untuk memperkaya diri pribadi, melainkan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konstituen, yakni rakyat yang memilih pejabat tersebut saat pemilihan legislatif. Hal ini menjadi sebuah permasalahan baru yang perlu dituntaskan agar tidak dijadikan para pejabat sebagai pelindung dalam melakukan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks di Indonesia.

### **5.2 Saran**

Peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan untuk para pejabat di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang, antara lain:

1. Sebagai seorang anggota legislatif yang memiliki hak suara dan hak usulnya, hendaknya menggunakan hak tersebut dengan baik dan maksimal, misalkan dalam penyusunan APBD daerahnya agar meminimalisir kebocoran dana atau anggaran yang harus dipergunakan secara maksimal untuk rakyat

2. Bagi para pejabat politik baik ketua, wakil ketua, maupun anggota dewan yang berada di kota/kabupaten maupun propinsi, permohonan dana oleh konstituen tidak dapat disalah gunakan menjadi alasan kuat untuk melakukan tindak pidana korupsi. *Networking* dan kuasa DPRD dalam membuat perda harusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu para konstituen yang memang membutuhkan pertolongan
3. Pengklasifikasian kebutuhan konstituen dan mengerucutkannya menjadi sebuah kebijakan publik akan lebih baik, daripada harus mengambil uang rakyat atas nama rakyat
4. Untuk penelitian ke depan, disarankan agar melakukan penelitian mengenai motivasi seseorang dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Mengingat, untuk menjadi wakil rakyat hendaknya niat tulusnya yakni mengabdikan untuk rakyat. Apabila nilai ini yang diperjuangkan, maka angka korupsi akan menurun

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ardianto, Elvvaro. 2009. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Bungin, H.M. Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (cetakan ketiga). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daryanto. 2011. *Ilmu Komunikasi*. Bandung : PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hidayat, Dasrun. 2012. *Komunikasi Antarpribadi dan Mediana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismaun. 2005. *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung: Historian Bandung Press.
- Komala, Lukiati. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran
- Miller, Katherine. 2005. *Communication Theories*. Singapore: Mc Graw Hill
- Morrisan, dan Andy Corry Wardhany. 2009. *Teori Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. 2008. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turner, Lynn H. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

### Jurnal

[https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/1885/1/simple-search?query=interpersonal+communication&sort\\_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=10](https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/1885/1/simple-search?query=interpersonal+communication&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=10)

<http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=search&s=dc&dc=kualitatif%20deskriptif%20komunikasi&type=all&page=5>

<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6461>

Revida, Erika. 2003. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. USU Digital Library

<http://www.e-resources.pnri.go.id/>

<http://www.emeraldinsight.com>

**Internet**

[www.transparency.org/research/cpi/](http://www.transparency.org/research/cpi/)

[www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id)

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)